

Pengaruh Rasio Kesenjangan, Pertumbuhan, dan Kemandirian terhadap Indeks Pengembangan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah

Rinaldi Rinaldi¹, Muhammad Riza Hafizi², Al Hujjah Asianingrum³

¹ IAIN Palangkaraya, Indonesia, rinaldi804140114@iain-palangkaraya.ac.id

² IAIN Palangkaraya, Indonesia, riza.hafizi@iain-palangkaraya.ac.id

³ Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia, al_hujjah@app.ipb.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Tengah periode 2011–2020. Fenomena yang diteliti adalah bagaimana alokasi dan efektivitas belanja daerah memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menjawab pertanyaan: apakah rasio kesenjangan, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian berpengaruh terhadap IPM secara parsial dan simultan? Studi ini menawarkan kebaruan dengan memadukan tiga indikator kinerja keuangan dalam satu model terhadap IPM, yang sebelumnya sering diteliti secara terpisah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari BPS dan analisis regresi linier berganda melalui SPSS. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio kesenjangan dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif signifikan, sedangkan rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Secara simultan, ketiganya berpengaruh signifikan. Kesimpulannya, keberhasilan pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh pola belanja dan kemandirian fiskal daerah. Temuan ini menekankan pentingnya alokasi anggaran yang strategis serta penguatan kapasitas pendapatan asli daerah sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

ABSTRACT

This study analyzes the influence of regional financial performance on the Human Development Index (HDI) in Central Kalimantan Province during 2011–2020. It investigates how budget allocation and spending effectiveness affect public welfare. The main research question is whether the harmony ratio, growth ratio, and fiscal independence ratio significantly affect HDI individually and simultaneously. The novelty of this study lies in integrating three key fiscal performance indicators into a single model, which have rarely been examined collectively in previous research. Using a quantitative approach and secondary data from BPS, the study

INFO ARTIKEL

Kata Kunci

kinerja keuangan, rasio kesenjangan, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, IPM

Keywords:

financial performance, compatibility ratio, growth ratio, independence ratio, HDI

Riwayat Artikel :

Penyerahan:

31 Mei 2025

Revisi:

22 Juni 2025

Diterima:

23 Juni 2025

Diterbitkan:

30 Juni 2025

employs multiple linear regression analysis via SPSS. The results indicate that the harmony and growth ratios negatively and significantly affect HDI, while the fiscal independence ratio has a positive and significant impact. Simultaneously, all three variables significantly influence HDI. The findings conclude that human development success is closely tied to spending patterns and fiscal autonomy. The study underscores the importance of strategic budgeting and enhancing local revenue capacity to improve quality of life.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi anggaran yang dikelola pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam mendorong kemajuan ekonomi dan sosial, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kinerja keuangan yang baik akan tampak dari optimalnya belanja pembangunan, pertumbuhan pendapatan daerah, dan tingginya kemandirian fiskal yang dapat menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat (Wadma, 2016, h. 1).

Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional dan daerah, IPM menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pemerintah. IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pencapaian IPM yang tinggi menjadi indikator bahwa suatu daerah berhasil menyediakan layanan dasar yang memadai dan berkelanjutan kepada warganya (Suenti dkk., 2018, h. 49). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola sumber daya fiskalnya untuk mendukung peningkatan IPM.

Di Indonesia, sistem desentralisasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2001 memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Namun, tantangan yang muncul kemudian adalah bagaimana memanfaatkan kewenangan tersebut secara bijak agar tidak hanya menghasilkan laporan keuangan yang baik, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan manusia. Dalam konteks ini, instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai alat penting dalam merealisasikan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran (Mahmudi, 2010 dalam Fathah, 2017, h. 37).

APBD merupakan manifestasi dari prioritas pembangunan yang diterjemahkan dalam bentuk pengalokasian anggaran belanja. Pengelolaan APBD secara efektif akan terlihat dari kinerja keuangan daerah, yang dapat diukur melalui beberapa rasio keuangan, seperti rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian. Ketiga rasio ini mewakili aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni efisiensi alokasi belanja, dinamika pertumbuhan keuangan, dan tingkat kemandirian fiskal (Sudaryo dkk., 2021, h. 11-12).

Rasio keserasian mencerminkan sejauh mana belanja daerah dialokasikan secara proporsional antara belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi yang terlalu besar mengindikasikan tingginya pengeluaran rutin, sementara belanja modal yang

tinggi menunjukkan adanya investasi pembangunan jangka panjang. Idealnya, belanja modal perlu ditingkatkan karena memiliki dampak yang lebih nyata terhadap pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan publik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan IPM (Sudaryo dkk., 2017, h. 14).

Selanjutnya, rasio pertumbuhan mengindikasikan perkembangan anggaran dari tahun ke tahun. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat pendapatan asli daerah (PAD) tumbuh dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang positif mencerminkan kemampuan fiskal daerah yang meningkat, meskipun demikian perlu dicermati apakah pertumbuhan tersebut digunakan secara efisien dalam sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan manusia (Adnyani, 2018, h. 172).

Adapun rasio kemandirian keuangan menunjukkan sejauh mana kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri tanpa tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal yang tinggi mencerminkan kekuatan ekonomi lokal dan kapasitas daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan secara otonom (Sudaryo dkk., 2021, h. 11-12). Dengan kata lain, semakin tinggi kemandirian keuangan suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan secara mandiri.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membuktikan adanya keterkaitan antara kinerja keuangan daerah dengan IPM. Hudaya (2018, h. 2) menunjukkan bahwa rasio keserasian dan kemandirian berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. Fincy Annisa (2017, h. 1) juga mengemukakan bahwa variabel kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan IPM. Namun, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Febri Nur Gita Sari (2020, h. xiv) dan Wardani (2018) memperlihatkan hasil yang tidak konsisten, dimana hanya PAD yang berpengaruh signifikan terhadap IPM, sementara belanja modal dan dana perimbangan tidak menunjukkan pengaruh yang berarti.

Gap inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yakni untuk menganalisis bagaimana rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2011–2020. Penelitian ini penting karena Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi dengan karakteristik geografis dan sosial yang khas membutuhkan kebijakan fiskal yang spesifik dan berbasis data lokal. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji hubungan langsung antara ketiga rasio tersebut secara simultan terhadap IPM di wilayah ini.

Pentingnya penelitian ini juga tidak terlepas dari tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Tengah, baik dari aspek geografis, demografis, maupun sosial ekonomi. Sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia, Kalimantan Tengah menghadapi kendala dalam penyediaan layanan publik yang merata, terutama di daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Kondisi ini memerlukan perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran agar pemerataan pembangunan dapat tercapai. Dalam hal ini, keuangan daerah menjadi instrumen utama untuk mengatasi kesenjangan antardaerah melalui program-program strategis yang mengedepankan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan.

Lebih jauh, Kalimantan Tengah juga dihadapkan pada permasalahan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ketergantungan yang besar pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menjadi penghambat otonomi fiskal apabila tidak diimbangi dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap rasio kemandirian menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana daerah ini mampu berdiri secara finansial dalam menyokong pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga bersifat strategis karena mengangkat isu pembangunan manusia yang menjadi fokus utama dalam agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada Tujuan 1 (tanpa kemiskinan), Tujuan 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), dan Tujuan 4 (pendidikan berkualitas). IPM sebagai indikator agregat dari ketiga aspek tersebut menjadi jembatan antara perencanaan pembangunan makro dan pencapaian target SDGs di tingkat lokal. Dengan demikian, kajian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi IPM akan memperkuat basis pengambilan keputusan yang *evidence-based*, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) Apakah rasio keserasian berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Tengah? (2) Apakah rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Tengah? (3) Apakah rasio kemandirian berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Tengah? (4) Apakah ketiga rasio tersebut secara simultan berpengaruh terhadap IPM?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah berupa laporan Statistik Keuangan Daerah dan IPM selama sepuluh tahun terakhir (2011–2020). Model regresi ini diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan statistik dan kekuatan pengaruh variabel-variabel keuangan daerah terhadap kualitas pembangunan manusia.

Secara metodologis, pemilihan periode waktu sepuluh tahun dalam penelitian ini juga mencerminkan niat untuk menangkap tren jangka panjang yang lebih stabil dan representatif. Rentang waktu 2011–2020 mencakup berbagai dinamika kebijakan fiskal nasional dan daerah, termasuk dampak dari kebijakan desentralisasi tahap lanjut serta implikasi dari perubahan prioritas pembangunan nasional. Dengan menganalisis data dalam jangka waktu yang panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kinerja keuangan daerah dan pencapaian IPM di Kalimantan Tengah.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai keuangan daerah dan pembangunan manusia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan manusia, serta menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas alokasi anggaran daerah.

Secara konseptual, penelitian ini juga merefleksikan pendekatan interdisipliner antara ekonomi publik dan pembangunan manusia. Kinerja keuangan daerah tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial

yang lebih luas seperti kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, analisis yang menghubungkan indikator keuangan dengan IPM memberikan perspektif holistik mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, urgensi dan signifikansi penelitian ini sangat tinggi dalam konteks pembangunan daerah berbasis data dan bukti empiris. Di tengah tantangan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan terarah menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini ingin mengukur seberapa besar pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui analisis statistik menggunakan data numerik. Penelitian ini bersifat kausal, karena bertujuan menguji hipotesis tentang adanya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2017). Teknik analisis data menggunakan Regresi linier berganda yang menghasilkan koefisien regresi, nilai signifikansi (uji t dan F), serta koefisien determinasi (R^2) yang menggambarkan sejauh mana model dapat menjelaskan variasi IPM.

Populasi dalam penelitian ini adalah Statistik Keuangan Daerah meliputi Kinerja Keuangan, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2011 hingga 2020. Provinsi Kalimantan Tengah dipilih karena memiliki karakteristik pembangunan yang unik dengan wilayah geografis yang luas, tantangan logistik, serta ketimpangan pembangunan antar daerah yang masih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk mengungkap sejauh mana kebijakan fiskal daerah mampu menjawab tantangan tersebut melalui kinerja keuangan yang optimal. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel jenuh, dimana keseluruhan populasi dipilih sebagai sampel. Adapun jenis data berupa *time series* yang memungkinkan untuk mengamati dinamika variabel dari waktu ke waktu, sekaligus mengontrol fluktuasi musiman dan dampak kebijakan tahunan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, melalui dokumen resmi publikasi BPS. Data yang dikumpulkan meliputi laporan Statistik Keuangan Daerah dan laporan IPM Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2011 hingga 2020. Validasi terhadap data dilakukan dengan membandingkan antar tahun serta mengecek konsistensi antar laporan yang dipublikasikan.

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Indikator Variabel Independen

No	Variabel	Indikator
1	Rasio Keserasian	$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$
2	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	$\frac{\text{PADn} - \text{PADn-1}}{\text{PADn-1}} \times 100$
3	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100$

Rasio keserasian: mengukur proporsi antara belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja daerah (Mahmudi, 2010 dalam Fathah, 2017, h. 37). Rasio ini mengindikasikan arah kebijakan belanja daerah—apakah lebih konsumtif atau produktif. Rasio pertumbuhan: mengukur perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun (Halim, 2007 dalam Fathah, 2017, h. 38). Rasio ini menunjukkan sejauh mana daerah mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya dari waktu ke waktu. Rasio kemandirian keuangan daerah: mengukur perbandingan PAD terhadap total pendapatan yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah (Sudaryo dkk., 2021, h. 11–12). Rasio ini penting untuk menilai sejauh mana ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

Tabel 2. Indikator Variabel Dependen

Variabel	Indikator
Indeks Pembangunan Manusia	$\sqrt[3]{(IKesehatan) \times (IPendidikan) \times (IPengeluaran)} \times 100$

Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan capaian rata-rata dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (Suenti dkk., 2018, h. 49). IPM dipilih sebagai indikator karena bersifat multidimensional dan menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat secara luas.

Hasil dan Analisis

Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Semua hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi di atas 0,05. Uji linearitas melalui grafik scatterplot memperlihatkan pola yang tersebar acak, menunjukkan hubungan linear antara variabel. Uji multikolinearitas mengindikasikan tidak adanya korelasi tinggi

antar variabel independen karena nilai VIF berada di bawah 10. Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Terakhir, uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson menunjukkan nilai mendekati 2, yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig.
Rasio Kesenjangan (X ₁)	-0,435	-3,116	0,014*
Rasio Pertumbuhan (X ₂)	-0,526	-3,745	0,006*
Rasio Kemandirian (X ₃)	0,711	5,114	0,001*
<i>R-squared</i>	0,883	-	-
F-hitung	18,943	-	0,001*

Keterangan: *Signifikan pada $\alpha < 0,05$

Hasil regresi menunjukkan bahwa secara parsial, rasio kesenjangan (X₁) dan rasio pertumbuhan (X₂) berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, sedangkan rasio kemandirian (X₃) berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Secara simultan, ketiga variabel independen ini berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai *R-squared* sebesar 88,3%.

Analisis dan Interpretasi Temuan

Temuan pertama menunjukkan bahwa rasio kesenjangan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja operasi yang tidak diiringi peningkatan belanja modal justru menurunkan kualitas pembangunan manusia. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2010 dalam Fathah, 2017, h. 37), bahwa proporsi belanja operasi yang tinggi biasanya tidak memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Jika rasio belanja modal lebih kecil dari belanja operasi, maka pemerintah belum optimal dalam pembangunan infrastruktur layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Temuan kedua, rasio pertumbuhan juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap IPM. Meskipun rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur dinamika anggaran, tetapi jika pertumbuhan anggaran tidak tepat sasaran atau dialokasikan pada belanja konsumtif, maka pertumbuhan tersebut tidak meningkatkan IPM. Hal ini sesuai dengan argumen Halim (2007 dalam Fathah, 2017, h. 38) bahwa pertumbuhan PAD yang tidak diimbangi peningkatan efisiensi alokasi belanja modal, tidak akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, rasio kemandirian keuangan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap IPM. Ini berarti semakin tinggi kemandirian fiskal, semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan manusia secara otonom. Temuan ini sejalan dengan teori Sudaryo dkk. (2021, h. 11–12) dan penelitian Hudaya (2018, h. 2), yang menyatakan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian

tinggi mampu merancang kebijakan pembangunan manusia tanpa ketergantungan pada pusat.

Hasil ini memperkuat studi Fincy Annisa (2017, h. 1) yang menyatakan bahwa rasio kinerja keuangan seperti kemandirian dan keserasian berpengaruh terhadap pembangunan manusia melalui jalur pertumbuhan ekonomi. Namun, berbeda dengan penelitian Febri Nur Gita Sari (2020, h. xiv) yang menyebutkan bahwa hubungan kemandirian fiskal dengan IPM tidak signifikan, penelitian ini menemukan bukti kuat akan hubungan signifikan tersebut. Perbedaan konteks geografis dan struktur belanja daerah kemungkinan memengaruhi hasil yang bertolak belakang tersebut.

Lebih lanjut, hasil uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Hal ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan IPM, diperlukan pengelolaan keuangan yang komprehensif, tidak cukup hanya mengandalkan satu aspek saja. Hal ini sejalan dengan teori *value for money* yang mengharuskan anggaran publik digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk menciptakan kesejahteraan (Wadma, 2016, h. 1).

Dengan R-squared sebesar 88,3%, model yang digunakan dalam penelitian ini sangat kuat dalam menjelaskan variasi IPM berdasarkan rasio-rasio keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa strategi fiskal daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan manusia di Kalimantan Tengah.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, hasil ini memperkuat argumentasi bahwa IPM dapat dijelaskan oleh indikator kinerja keuangan daerah. Penelitian ini memodifikasi kerangka teori pembangunan ekonomi daerah dengan memasukkan rasio pertumbuhan sebagai indikator efisiensi anggaran. Hasilnya memperkaya literatur yang sebelumnya lebih menekankan pada rasio kemandirian dan keserasian semata.

Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merancang struktur APBD yang lebih pro-pembangunan manusia. Peningkatan belanja modal dan penguatan kemandirian fiskal harus dijadikan prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan berbasis anggaran bukan hanya perkara teknis akuntansi, tetapi juga kebijakan sosial. Alokasi anggaran yang berpihak pada pembangunan manusia perlu dipertahankan, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Secara keseluruhan, hasil ini juga menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas desentralisasi fiskal di Indonesia. Temuan yang menunjukkan pentingnya kemandirian fiskal mengindikasikan bahwa transfer dari pusat harus dimanfaatkan sebagai pendorong inisiatif lokal, bukan sebagai ketergantungan jangka panjang. Dengan memperhatikan dinamika kinerja keuangan dan capaian IPM yang dianalisis secara empiris, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan manusia dapat dirancang, diukur, dan ditingkatkan melalui manajemen keuangan publik yang strategis dan berkelanjutan.

Implikasi lain yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.

Kinerja keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas teknis seperti Badan Keuangan Daerah, tetapi juga harus diselaraskan dengan perangkat daerah lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Bappeda. Dengan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, prioritas pembangunan manusia dapat dijabarkan lebih komprehensif dan terukur. Selain itu, pemanfaatan data dan indikator pembangunan seperti IPM harus menjadi landasan utama dalam proses perencanaan dan penganggaran. Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan prioritas mereka, kebijakan fiskal daerah akan lebih akurat dalam merespons tantangan pembangunan manusia di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penelitian ini juga mendorong pentingnya evaluasi berkala terhadap kinerja belanja daerah, khususnya belanja modal. Pemerintah daerah harus memiliki mekanisme untuk menilai sejauh mana belanja pembangunan memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya indikator kinerja berbasis *outcome*, pemerintah dapat mengetahui efektivitas program dan melakukan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya. Dalam konteks ini, sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) menjadi sangat relevan dan harus terus diperkuat.

Akhirnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara pengelolaan keuangan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lanjutan dapat memperluas variabel independen, mempertimbangkan aspek kelembagaan, tata kelola pemerintahan, serta peran sektor swasta dalam pembangunan manusia. Dengan demikian, pendekatan interdisipliner sangat penting dalam memperkuat pemahaman kita terhadap dinamika pembangunan daerah yang kompleks dan terus berkembang.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa kinerja keuangan daerah memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2011–2020. Tiga indikator utama kinerja keuangan yang diuji, yakni rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian, menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), baik secara parsial maupun simultan. Rasio keserasian dan rasio pertumbuhan diketahui memberikan dampak negatif terhadap IPM, sedangkan rasio kemandirian menunjukkan pengaruh positif yang signifikan.

Temuan ini menggambarkan bahwa pola pengeluaran pemerintah daerah yang masih didominasi oleh belanja operasi berkontribusi pada lemahnya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar yang krusial dalam meningkatkan IPM.

Ketidakseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal menjadi kendala utama dalam efektivitas anggaran pembangunan. Ketika anggaran lebih banyak terserap untuk belanja rutin seperti gaji dan tunjangan, maka investasi pada sektor kesehatan, pendidikan, dan perumahan menjadi terbatas. Padahal, sektor-sektor tersebut adalah fondasi dari pencapaian IPM yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pertumbuhan fiskal yang tercermin dari peningkatan PAD ternyata belum sepenuhnya memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun secara nominal pendapatan daerah meningkat, namun efektivitas alokasi anggaran belum diarahkan untuk mendukung *outcome* sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pertumbuhan fiskal yang tidak disertai dengan kebijakan anggaran yang berpihak pada pelayanan publik hanya akan menciptakan pertumbuhan tanpa pemerataan.

Sebaliknya, kemandirian fiskal terbukti memiliki korelasi positif terhadap peningkatan IPM. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatannya sendiri memberikan ruang lebih besar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kemandirian fiskal menjadi indikator penting keberhasilan otonomi daerah dan menunjukkan bahwa daerah yang memiliki kapasitas fiskal memadai akan lebih fleksibel dalam melaksanakan program pembangunan manusia secara efektif.

Secara simultan, ketiga rasio tersebut menjelaskan hampir 90% variasi perubahan IPM, menunjukkan bahwa aspek fiskal sangat menentukan arah pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan anggaran daerah bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh strategi pengalokasian dan efektivitas belanja. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kinerja keuangan daerah dapat menjadi instrumen utama dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial seperti Kalimantan Tengah.

Referensi

- Adnyani, N. K. S. (2018) Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal. Depok: Rajawali Pers.
- Annisa, F. (2017) Analisis Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Gini, Tesis Magister, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah. Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2020. Badan Pusat Statistik. <https://kalteng.bps.go.id/id/statistics-table/3/V25GaFNHaExaMnhITm1sWmRrUlJZelJzYUc1SGR6MDkjMw==/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah--2020.html?year=2020>.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (2013) Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013. Badan Pusat Statistik.

<https://kalteng.bps.go.id/id/publication/2015/09/22/1b147b33d0517985d6a0235c/statistik-keuangan-daerah-kalimantan-tengah-2013.html>.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (2014) Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014. Badan Pusat Statistik. <https://kalteng.bps.go.id/id/publication/2016/11/16/5ea6a12722c382c66422aa23/statistik-keuangan-daerah-kalimantan-tengah-2014.html>.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (2015) Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Badan Pusat Statistik. <https://kalteng.bps.go.id/id/publication/2017/12/08/837f6d5029305814a167e871/statistik-keuangan-daerah-provinsi-kalimantan-tengah-2015-2016.html>.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (2017) Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017. Badan Pusat Statistik. <https://kalteng.bps.go.id/id/publication/2018/12/20/e6b236c7e99d5a5ca8f6428a/statistik-keuangan-daerah-provinsi-kalimantan-tengah-2017.html>

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (2018) Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017. Badan Pusat Statistik. <https://kalteng.bps.go.id/id/publication/2019/12/18/c7b1df3671671ba6102869c3/statistik-keuangan-daerah-provinsi-kalimantan-tengah-2018.html>

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (2019) Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Badan Pusat Statistik. <https://kalteng.bps.go.id/id/publication/2020/12/17/6adcaff24bd80ef99b17d891/statistik-keuangan-daerah-provinsi-kalimantan-tengah-2019.html>

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (2020) Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Badan Pusat Statistik. <https://kalteng.bps.go.id/id/publication/2021/12/17/foa3fea55898cbfd9da072fi/statistik-keuangan-daerah-provinsi-kalimantan-tengah-2020.html>.

Fathah, R. N. (2017) Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Halim, A. (2001) Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hay, T. (2017) Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran di Provinsi Papua Barat. Malang: Universitas Brawijaya.

Hudaya, D. B. (2018) Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017), Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta.

Kurhayadi, K., Insani, S. J. (ed.) (2020) Kebijakan Publik di Era Digitalisasi. Sumatera Barat: Penerbit Insan Cendekia Mandiri.

Mahmudi, M. (2010) Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Republik Indonesia (2004) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Indonesia.

- Sari, F. N. G. (2020) Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur, Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Sudaryo, Y., Christian, P. (ed.) (2021) Keuangan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Suenti, L. et al. (2018) Buku Pendamping: Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas VIII. Malang: Media Nusa Creative.
- Wadma, S. (2016) Hubungan Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan, Jurnal Warta, 50, Universitas Dharmawangsa, Oktober.
- Wulandari, P. A. and Iryanie, E. (2018) Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish.